



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 49 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR DATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakannya Forum Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Daftar Data Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa Daftar Data Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor Tentang 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);

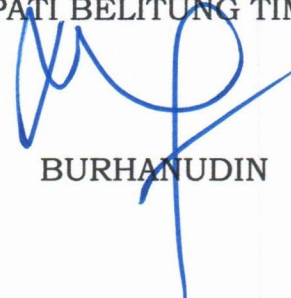
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR DATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Daftar Data Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan daftar data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

DAFTAR DATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No	Sektor/ Urusan	Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	Tagging RAD SPBE
1	2	3	4	5	6	7
1	0. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Desember	RAD.03.07.04 PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT
2	0. Indeks Pembangunan Manusia	Rata-Rata Lama Sekolah	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Desember	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
3	0. Indeks Pembangunan Manusia	Angka Harapan Lama Sekolah	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Desember	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
4	0. Indeks Pembangunan Manusia	Umur Harapan Hidup	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Desember	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
5	0. Indeks Pembangunan Manusia	Pengeluaran Per Kapita (Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan)	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Desember	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
6	0. Indeks Pembangunan Manusia	Gini Rasio (Ketimpangan)	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Desember	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
7	0. Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Badan Pusat Statistik	Tahunan	September	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
8	0. Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Badan Pusat Statistik	Tahunan	September	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
9	0. Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Badan Pusat Statistik	Tahunan	September	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
10	0. Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Badan Pusat Statistik	Tahunan	September	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
11	0. PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Februari	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH
12	0. PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Februari	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH

13	0. PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Februari	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH
14	0. PDRB Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Februari	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH
15	0. PDRB Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Februari	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH
16	0. PDRB Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Februari	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH
17	0. Inflasi	Indeks Harga Konsumen	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Setiap Bulan	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH
18	1.01 Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
19	1.01 Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
20	1.01 Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
21	1.01 Pendidikan	Angka Pendidikan yang ditamatkan (SMP)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
22	1.01 Pendidikan	Angka Partisipasi Murni PAUD	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
23	1.01 Pendidikan	Angka Partisipasi Murni SD	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
24	1.01 Pendidikan	Angka partisipasi Murni SMP	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

25	1.01 Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah dikdas	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
26	1.01 Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
27	1.01 Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMP	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
28	1.01 Pendidikan	Angka Kelulusan SD	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
29	1.01 Pendidikan	Angka Kelulusan SMP	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
30	1.01 Pendidikan	Angka Melanjutkan SD Ke SMP	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
31	1.01 Pendidikan	Angka Melanjutkan SMP Ke SMA	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
32	1.01 Pendidikan	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
33	1.01 Pendidikan	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
34	1.01 Pendidikan	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
35	1.01 Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (SMP)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

36	1.01 Pendidikan	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SD per 10.000	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
37	1.01 Pendidikan	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SMP per 10.000	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
38	1.01 Pendidikan	Rasio guru /murid per kelas rata-rata sekolah Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
39	1.01 Pendidikan	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
40	1.01 Pendidikan	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki2	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
41	1.01 Pendidikan	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
42	1.01 Pendidikan	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
43	1.01 Pendidikan	Guru yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
44	1.01 Pendidikan	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
45	1.01 Pendidikan	Persentase warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.03 PENDIDIKAN NON FORMAL
46	1.01 Pendidikan	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN

						MENENGAH
47	1.01 Pendidikan	Persentase SD/MI berakreditasi minimal A	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
48	1.01 Pendidikan	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal A	Dinas Pendidikan	Tahunan	Mei	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
49	1.02 Kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
50	1.02 Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
51	1.02 Kesehatan	Angka Kelangsungan hidup bayi	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
52	1.02 Kesehatan	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
53	1.02 Kesehatan	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
54	1.02 Kesehatan	Angka Kematian Ibu per 1.00.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
55	1.02 Kesehatan	Rasio Posyandu persatuan balita	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
56	1.02 Kesehatan	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
57	1.02 Kesehatan	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
58	1.02 Kesehatan	Rasio Dokter (umum dan gigi) per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
59	1.02 Kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
60	1.02 Kesehatan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
61	1.02 Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT

62	1.02 Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
63	1.02 Kesehatan	Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
64	1.02 Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yg diimunisasi campak	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
65	1.02 Kesehatan	Non Polio AFP rate 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
66	1.02 Kesehatan	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
67	1.02 Kesehatan	Cakupan Penemuan dan penanganan penyakit DBD	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
68	1.02 Kesehatan	Penderita diare yang ditangani	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
69	1.02 Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
70	1.02 Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
71	1.02 Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
72	1.02 Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
73	1.02 Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
74	1.02 Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
75	1.02 Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
76	1.02 Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
77	1.02 Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
78	1.02 Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

79	1.02 Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
80	1.02 Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
81	1.02 Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
82	1.02 Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
83	1.02 Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
84	1.02 Kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
85	1.02 Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
86	1.02 Kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
87	1.02 Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
88	1.02 Kesehatan	Persentase rumah sakit terakreditasi	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
89	1.02 Kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
90	1.02 Kesehatan	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
91	1.02 Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
92	1.02 Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN
93	1.02 Kesehatan	Proporsi pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN
94	1.02 Kesehatan	Persentase Penggunaan Obat	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN

		Rasional				KEFARMASIAN
95	1.02 Kesehatan	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
96	1.02 Kesehatan	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN
97	1.02 Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
98	1.02 Kesehatan	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
99	1.02 Kesehatan	Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Dinas Kesehatan	Triwulanan	Mei	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
100	1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Januari	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
101	1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Januari	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
102	1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Januari	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
103	1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase penanganan drainase lingkungan dan perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Januari	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
104	1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase penanganan jalan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Januari	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
105	1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Januari	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
106	1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Januari	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
107	1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Januari	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

108	1.04 Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Mei	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
109	1.04 Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, utilitas (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Mei	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
110	1.04 Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Mei	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
111	1.04 Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Mei	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
112	1.04 Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rasio permukiman layak huni	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Mei	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
113	1.05 Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Desember	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
114	1.05 Kebencanaan	Jumlah Kejadian Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bulanan	Awal Bulan Berikutnya	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
115	1.05 Kebencanaan	Jenis Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bulanan	Awal Bulan Berikutnya	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
116	1.05 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Satuan Polisi Pamong Praja	Triwulanan	April	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
117	1.05 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Satuan Polisi Pamong Praja	Triwulanan	April	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
118	1.05 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	Satuan Polisi Pamong Praja	Triwulanan	April	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
119	1.06 Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Mei	RAD.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
120	1.06 Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Mei	RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
121	1.06 Sosial	PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Mei	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL

122	2.07 Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
123	2.07 Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
124	2.07 Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
125	2.07 Tenaga Kerja	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
126	2.07 Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
127	2.07 Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
128	2.07 Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
129	2.07 Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
130	2.07 Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Formal	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
131	2.07 Tenaga Kerja	Persentase Setengah Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
132	2.07 Tenaga Kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
133	2.07 Tenaga Kerja	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
134	2.07 Tenaga Kerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

135	2.07 Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
136	2.07 Tenaga Kerja	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
137	2.08 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Mei	RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER
138	2.08 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Mei	RAD.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK
139	2.09 Pangan	Ketersediaan Energi perkapita	Dinas Pertanian dan Pangan	Tahunan	Mei	RAD.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
140	2.09 Pangan	Ketersediaan protein perkapita	Dinas Pertanian dan Pangan	Tahunan	Mei	RAD.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
141	2.09 Pangan	Penguatan cadangan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Tahunan	Mei	RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN
142	2.09 Pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pertanian dan Pangan	Tahunan	Mei	RAD.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
143	2.09 Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Tahunan	Mei	RAD.02.03.22 KEAMANAN PANGAN
144	2.09 Pangan	Persentase penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Tahunan	Mei	RAD.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
145	2.11 Lingkungan Hidup	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Mei	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
146	2.11 Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Mei	RAD.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
147	2.11 Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Mei	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH
148	2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semester	Juli	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
149	2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semester	Juli	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
150	2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semester	Juli	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
151	2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semester	Juli	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

152	2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semester	Juli	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
153	2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semester	Juli	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
154	2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semester	Juli	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
155	2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semester	Juli	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
156	2.13 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase kerjasama antar desa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Tahunan	Januari	RAD.03.05.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
157	2.13 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Semester	Juli dan Januari	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
158	2.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Tahunan	Januari	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
159	2.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Tahunan	Januari	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
160	2.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Tahunan	Januari	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
161	2.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 – 19) per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Tahunan	Januari	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
162	2.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Tahunan	Januari	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
163	2.15 Perhubungan	Jumlah Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan yang Dilayani	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
164	2.15 Perhubungan	Jumlah Pelabuhan	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
165	2.15 Perhubungan	Jumlah Terminal	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
166	2.15 Perhubungan	Jumlah Penumpang	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI

167	2.15 Perhubungan	Rasio Konektivitas antar wilayah	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
168	2.15 Perhubungan	Persentase Layanan Angkutan Darat	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
169	2.15 Perhubungan	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
170	2.15 Perhubungan	Persentase Ruas Jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
171	2.15 Perhubungan	Persentase Pembangunan Pelabuhan Orang dan Barang	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
172	2.15 Perhubungan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
173	2.15 Perhubungan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	Dinas Perhubungan	Tahunan	Mei	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
174	2.16 Komunikasi Dan Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Tahunan	Mei	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA
175	2.16 Komunikasi Dan Informatika	Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Tahunan	Mei	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
176	2.16 Komunikasi Dan Informatika	Persentase digitalisasi layanan publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Tahunan	Mei	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
177	2.16 Komunikasi Dan Informatika	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Semester	Juli	RAD.09.04.01 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
178	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase koperasi aktif	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI
179	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase koperasi sehat	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI
180	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO
181	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO
182	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI

183	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI
184	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
185	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
186	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
187	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
188	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
189	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan fasilitasi dukungan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
190	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.05 KEWIRAUSAHAAN
191	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.05 KEWIRAUSAHAAN
192	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam system <i>Online Data System</i> (ODS)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO
193	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO

194	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO
195	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO
196	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO
197	2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendamping	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahunan	Mei	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO
198	2.18 Penanaman Modal	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Mei	RAD.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
199	2.18 Penanaman Modal	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Mei	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
200	2.18 Penanaman Modal	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Mei	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
201	2.18 Penanaman Modal	Persentase Penambahan Investor yang merealisasikan Investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Mei	RAD.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
202	2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Mei	RAD.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
203	2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	Persentase Wirausaha Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Mei	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
204	2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Mei	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
205	2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	Cakupan Pelatih dan wasit yang bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Mei	RAD.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
206	2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Mei	RAD.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
207	2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	Tingkat Partisipasi Kepramukaan dalam pengembangan kreativitas pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Mei	RAD.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
208	2.20 Statistik	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Tahunan	Mei	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
209	2.21 Persandian	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Tahunan	Mei	RAD.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
210	2.22 Kebudayaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tahunan	Mei	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN

211	2.22 Kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tahunan	Mei	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
212	2.22 Kebudayaan	Terwujudnya pengelolaan Museum dan Galeri Maritim	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tahunan	Mei	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
213	2.23 Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tahunan	Mei	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
214	2.23 Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tahunan	Mei	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
215	2.24 Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tahunan	Mei	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
216	2.24 Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tahunan	Mei	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
217	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Produksi perikanan	Dinas Perikanan	Triwulanan	April	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
218	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Nilai Produksi Perikanan	Dinas Perikanan	Triwulanan	April	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
219	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan	Triwulanan	April	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
220	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Triwulanan	April	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
221	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Dinas Perikanan	Triwulanan	April	RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
222	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Nilai Produksi Perikanan Budi Daya	Dinas Perikanan	Triwulanan	April	RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
223	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Produksi pengolahan ikan	Dinas Perikanan	Triwulanan	April	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
224	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Nilai Produksi Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan	Triwulanan	April	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
225	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Angka konsumsi ikan	Dinas Perikanan	Triwulanan	April	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
226	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Tahunan	Mei	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
227	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	Tahunan	Mei	RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA

228	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Konsumsi Ikan	Dinas Perikanan	Tahunan	Mei	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
229	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	Dinas Perikanan	Tahunan	Mei	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
230	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	Dinas Perikanan	Tahunan	Mei	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
231	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	Dinas Perikanan	Tahunan	Mei	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
232	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya	Dinas Perikanan	Tahunan	Mei	RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
233	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Nilai Produksi Budi Daya Ikan Hias	Dinas Perikanan	Triwulanan	Mei	RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
234	3.25 Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Hias	Dinas Perikanan	Triwulanan	Mei	RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
235	3.26 Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tahunan	Mei	RAD.02.11.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA
236	3.26 Pariwisata	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tahunan	Mei	RAD.02.11.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA
237	3.26 Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan (<i>length of stay</i>)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tahunan	Mei	RAD.02.11.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA
238	3.30 Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Mei	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
239	3.31 Perindustrian	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Mei	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
240	3.31 Perindustrian	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Mei	RAD.02.01.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
241	4.01 Sekretariat Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sekretariat Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
242	4.01 Sekretariat Daerah	Indeks Kelembagaan	Sekretariat Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
243	4.01 Sekretariat Daerah	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
244	4.01 Sekretariat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
245	4.01 Sekretariat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Sekretariat Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

246	4.02 Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Tahunan	Mei	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA
247	4.02 Sekretariat DPRD	Persentase Jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	Sekretariat DPRD	Tahunan	Mei	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA
248	5.01 Perencanaan	Indeks Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
249	5.01 Perencanaan	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan dengan Nilai Baik	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
250	5.01 Perencanaan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
251	5.02 Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
252	5.02 Keuangan	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
253	5.02 Keuangan	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN
254	5.02 Keuangan	Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA
255	5.02 Keuangan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
256	5.02 Keuangan	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
257	5.02 Keuangan	Kemandirian keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
258	5.02 Keuangan	Persentase Belanja Pendidikan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
259	5.02 Keuangan	Persentase Belanja Kesehatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
260	5.02 Keuangan	Persentase SiLPA terhadap APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
261	5.02 Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
262	5.02 Keuangan	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN

263	5.02 Keuangan	Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
264	5.02 Keuangan	Assets Management	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
265	5.02 Keuangan	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
266	5.02 Keuangan	Proporsi pajak terhadap total belanja	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
267	5.02 Keuangan	Opini BPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
268	5.03 Kepegawaian	Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Tahunan	Mei	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
269	5.04 Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Profesionalisme ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Tahunan	Mei	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
270	5.05 Penelitian dan Pengembangan	Indeks Daya Saing Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI
271	5.05 Penelitian dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Penelitian dan Kajian Oleh Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI
272	5.05 Penelitian dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi oleh Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tahunan	Mei	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI
273	6.01 Pembinaan dan Pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Tahunan	Mei	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
274	6.01 Pembinaan dan Pengawasan	Maturitas SPIP	Inspektorat	Tahunan	Mei	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
275	6.01 Pembinaan dan Pengawasan	Kapabilitas APIP	Inspektorat	Tahunan	Mei	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
276	6.01 Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Inspektorat	Tahunan	Mei	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
277	7.01 Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan	Semester	Juli	RAD.03.07.04 PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT
278	7.01 Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kecamatan	Tahunan	Mei	RAD.05.02.01 KEAMANAN DAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN

		di wilayah Kecamatan				MASYARAKAT
279	7.01 Kecamatan	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Kecamatan	Tahunan	Mei	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
280	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase bantuan partai politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Mei	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
281	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks partisipasi politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Mei	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
282	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya peran FPK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Mei	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
283	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya peran intelijen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Mei	RAD.01.01.03 POTENSI PERTAHANAN
284	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	Menurunnya kasus penggunaan obat terlarang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Mei	RAD.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN